

# **TESIS**

## **PERAN MODERASI PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

*The Effect of Human Resource Competence and the Use of  
Information Technology Systems to Improve the Quality of  
Government Financial Statements District*

Disusun dan diajukan oleh :

**IRHAM  
A042202002**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

# **TESIS**

## **PERAN MODERASI PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

*The Effect of Human Resource Competence and the Use of  
Information Technology Systems to Improve the Quality of  
Government Financial Statements District*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**IRHAM  
A042202002**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2022**

## TESIS

### PERAN MODERASI PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

*The Effect of Human Resource Competence and the Use of  
Information Technology Systems to Improve the Quality of  
Government Financial Statements District*

disusun dan diajukan oleh

**IRHAM**  
**A042202002**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 25 November 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 196406091992031003

Pembimbing Pendamping



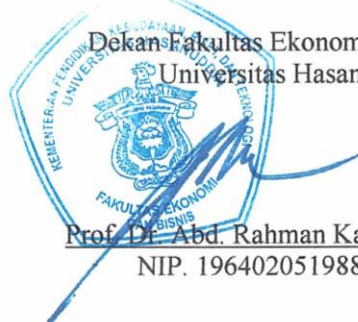
Dr. Sabir, SE., M.Si  
NIP. 197407152002121003

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196704141994121001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **IRHAM**

NIM : **A042202002**

Jurusan/program Studi : **Magister Keuangan Daerah**

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul:

**PERAN MODERASI PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 25 November 2022

Yang menyatakan,  
Yang Menyatakan



Irham

## PRAKATA

Maha Suci Allah yang menggenggam takdir setiap mahluknya, dengan takdir baik NYA peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Peran Moderasi Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan setiap penduduk bumi untuk keselamatan dunia dan akhirat.

Penyelesaian tesis ini tidaklah mudah bagi peneliti, hambatan dan cobaan tetap ada untuk menjadi energi positif dalam menyelesaikan tugas akhir ini, hambatan itu kemudian menjadi suluh untuk membentuk karakter yang jauh lebih baik bagi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa karya ini tidak akan rampung tanpa dukungan dari pihak lain oleh karena itu melalui kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa.,M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si.,CRA.,CRP.,CWM selaku Wakil Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
5. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. Sabir, SE.,M.Si sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
6. Bapak Dr. Anas Iswanto anwar, SE., MA, Ibu Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, dan Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si., CRA., CRP., CWM. selaku dosen penguji, terima kasih atas masukan dan nasehat yang telah diberikan untuk penyusunan penelitian ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
8. Bapak dan Ibu Pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Pak Haris dan pegawai lainnya yang tidak peneliti sebutkan.;
9. Orang tua peneliti, Bapak Mustafa dan Ibu Hj. Nikma, terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.
10. Istri tercinta Hajar, SKM, M.Kes beserta anak - anak peneliti Muh Alif Khalifah dan Qurrata Ayyun Batari unga, terimakasih atas waktu dan doa untuk kami.
11. Segenap Rekan kerja, pada kantor Bappelitbangda Soppeng, sebagai teman diskusi, trimakasih atas waktu dan dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
13. semua pihak yang turut terlibat dalam penelitian ini yang tidak sempat disebutkan namanya, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, walau penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penelitian ini.

Makassar, November 2022

IRHAM

## ABSTRAK

IRHAM. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SOM) dan Pemanfaatan sistem Teknologi informasi terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (dibimbing oleh Arifuddin dan Sabir)

Laporan keuangan yang berkualitas oleh sumber daya manusia (SOM) yang berkompeten di bidang pengelola keuangan. Dalam tata kelola keuangan di Pemerintah Soppeng juga ditemukan beberapa kelemahan, di antaranya penatausahaan, inventarisasi, dan penilaian aset tetap belum optimal, demikian juga dengan mekanisme dan penatausahaan belanja modal. Pengelolaan piutang serta proses pengadaan barang dan jasa yang belum dilakukan secara optimal juga menjadi temuan BPK. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kompetensi SOM dan pengaruh pemanfaatan sistem teknologi informasi bagi PPK SKPD terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa adalah 1) kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 2) pemanfaatan system teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan 3) pemanfaatan sistem teknologi informasi secara signifikan dapat memoderasi kompetensi sumberdaya manusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: laporan keuangan, kompetensi sdm, pemanfaatan system teknologi informasi.



## ABSTRACT

IRHAM. *The Effect of Human Resource Competence and the Use of Information Technology Systems to Improve the Quality of Government Financial Statements District* (supervised by Arifuddin and Sabir)

Quality financial statements are produced by human resources (HR) that are competent in the field of financial managers. In financial management of Soppeng Government, some weaknesses are also found including administration, inventory, and valuation of fixed assets that are not optimal. Besides, mechanism and administration of capital expenditure receivables management and procurement of goods and services that have not been done optimally are also a finding of Audi Board of the Republic of Indonesia (BPK). This study aims to determine the effect of competence of human resources and the effect of the use of information technology systems for PPK SKPD to improve the quality of financial statements of local government, and the effect of competence of human resources to improve the quality of financial statements of local government with the utilization of information technology systems as a moderation variable. This study used quantitative method. The results of this study show that (1) the competence of human resources significantly affects the quality of financial statements of local government; (2) the use of information technology systems significantly affects the quality of financial statements of local government, and (3) the use of information technology systems can significantly moderate the competence of human resources to the quality of financial statements of local government.

Keywords: financial statements, competence of human resources, the use of information technology systems





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	16
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	17
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	17
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	17
1.4.2 Manfaat Praktis .....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI**

2.1 KAJIA TEORI.....	19
2.1.1 TEORI STEWARDSHIP. ....	19
2.1.2 TEORI KEGUNAAN INFORMASI ( <i>DECISION-USEFULNES THEORY</i> ).....	21
2.1.3 KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.....	23
2.1.4 PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI .....	23
2.1.5 KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .....	27
2.1.6 KETERKAITAN ANTAR VARIABEL.....	29
2.2 TINJAUAN EMPIRIS .....	30

### **BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

3.1	KERANGKA KONSEPTUAL.....	35
3.2	PENGEMBANGAN HIPOTESIS .....	36
3.2.1	PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	36
3.2.2	PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN.....	37
3.2.3	PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI .....	39

### **BAB IV METODE PENELITIAN**

4.1	RANCANGAN PENELITIAN.....	42
4.2	SITUS DAN WAKTU PENELITIAN .....	42
4.3	POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN.....	42
4.4	DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN INDIKATOR PENELITIAN .....	43
4.5	SUMBER DATA.....	45
4.5.1	SUMBER DATA PRIMER.....	45
4.5.2	SUMBER DATA SEKUNDER.....	45
4.6	TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	45
4.7	TEKNIK ANALISIS DATA .....	46
4.7.1	UJI INSTRUMENT PENELITIAN .....	46
4.7.2	UJI ASUMSI KLASIK.....	47
4.7.3	PENGUJIAN HIPOTESIS .....	48
4.7.3.1	UJI T .....	49
4.7.3.2	KOEFISIEN DETERMINASI (ADJUSTED R <sup>2</sup> ) .....	49

## **BAB V HASIL PENELITIAN**

5.1	DESKRIPSI DATA .....	50
5.1.1	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF.....	51
5.2	PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS.....	53
5.2.1	PENGUJIAN VALIDITAS .....	53
5.2.2	PENGUJIAN RELIABILITAS.....	56
5.3	UJI ASUMSI KLASIK.....	57
5.3.1	Uji Normalitas.....	57
5.3.2	Uji Multikolinearitas.....	60
5.3.3	Uji Heteroskedastisitas .....	61
5.4	UJI HIPOTESIS .....	62

## **BAB VI PEMBAHASAN**

6.1	PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	66
6.2	PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	69
6.3	PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN PEMANFAATAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI.....	72

## **BAB VII PENUTUP**

7.1	KESIMPULAN .....	76
7.2	IMPLIKASI.....	77
7.3	KETERBATASAN.....	77
7.4	SARAN .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Devinisi Operasional dan Indikator Penelitian..... 43
Tabel 5.1	Karakteristik Responden ..... 51
Tabel 5.2	Descriptive Statistick..... 52
Tabel 5.3	Hasil Pengujian Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia ..... 54
Tabel 5.4	Hasil Pengujian Validitas Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi ..... 54
Tabel 5.5	Hasil Pengujian Validitas Sistem Teknologi Informasi ..... 55
Tabel 6.6	Hasil Pengujian Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia ..... 55
Tabel 5.7	Hasil Pengujian Reliabilitas ..... 56
Tabel 5.8	Hasil Uji Normalitas..... 57
Tabel 5.9	Hasil Uji Normalitas <i>Monte Carlo</i> ..... 59
Tabel 5.10	Hasil Uji Multikolinearitas..... 60
Tabel 5.11	Hasil Uji Regresi ..... 62
Tabel 5.12	Hasil Uji Regresi dengan Variabel Moderasi Z ..... 63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual .....	35
Gambar 5.1 <i>Scatterplots</i> .....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Reformasi keuangan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah Republik Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Regulasi tersebut mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah.

Dampak dari Reformasi keuangan tersebut adalah meningkatnya tuntutan pemerintah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance government*) (Arfianti, 2011). Tuntutan masyarakat telah mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP no. 71 tahun 2010).

Novianti dan Kiswanto (2016) menyatakan bahwa dalam konteks sektor publik, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah)

untuk memberikan 2 pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat). Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Sukmaningrum, 2012). Selain itu, pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010). Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan berkualitas apabila informasi akuntansi tersebut memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Kabupaten Soppeng sebagai entitas pelaporan yang dituntut untuk menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah, tentunya dituntut untuk menyajikan data dan informasi keuangan yang berkualitas. laporan keuangan pemerintah kabupaten soppeng mempunyai peranan penting sebagai dasar informasi yang handal pengambilan keputusan dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Penyediaan informasi akuntansi oleh pemerintah daerah juga diperlukan salah satunya untuk akses investasi, keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan pelayanan public.

Perlunya penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimiliki, pengendalian aset, kewajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi yang pada akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan pemerintah kabup[at]en soppeng. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten soppeng harus menjadi perhatian untuk menjadi dokumen strategis dalam merumuskan dan menganalisis strategi perencanaan keuangan dimasa yang



akan datang, tidak sekedar dalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten soppeng dapat dilihat dari suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan dan indicator-indikator pengelolaan keuangan lintas sectoral, meskipun kabupaten soppeng telah meraih opini wajar tanpa pengecualian selama mulai tahun 2014 sampai dengan 2020 Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan pemerintah daerah antara lain pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan, kompetensi sumber daya manusia, Tujuannya adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh masing masing terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari sisi opini, akan tetapi sejauh mana laporan keuangan memberikan dampak informasi yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk perencanaan anggaran dimasa mendatang, akan tetapi kasus dikabupaten soppeng laporan keuangan dijadikan tidak sepenuhnya dijadikan dasar pengambilan keputusan secara ekonomis, disisi lain laporan keuangan pemerintah daerah masih memiliki temuan-temuan pemeriksaan baik temuan administratif maupun sifatnya pengembalian kerugian negara/daerah, dengan demikian temuan pemeriksaan tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai pengelola pembangunan dan keuangan serta pelayanan publik, memiliki kewajiban untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan aktifitas pemerintahan yang dituangkan dalam dokumen laporan keuangan atas pengelolaan dana pemerintah kabupaten Soppeng

Salah satu syarat kualitas laporan keuangan adalah andal, dan laporan keuangan dikatakan andal jika terbebas dari hal yang menyesatkan, kesalahan yang material, menyajikan dengan jujur, dan dapat diverifikasi. Laporan keuangan agar dapat diandalkan, maka harus disajikan dengan lengkap, tanpa ada informasi bias. Pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Soppeng menarik untuk dikaji lebih lanjut sebab kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten soppeng tahun 2020 masih terdapat pengelolaan yang disajikan tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain; masih terdapat perhitungan pendapatan asli daerah yang tidak konsisten, pengelolaan belanja yang tidak memadai, dan pembayaran belanja yang tidak sesuai ketentuan, penyusunan APBD 2020 yang tidak sesuai ketentuan, pengelolaan piutang belum memadai, penilaian dan penatusahaan persediaan obat dan BMHP tidak memadai, pengelolaan dan penatusahaan aset tetap yang tidak memadai, dengan demikian maka peneliti perlu melihat lebih jauh kondisi tersebut diatas pada sisi ketersediaan SDM dan teknologi informasi sebagai sarana yang mampu melahirkan kualitas laporan keuangan dimasa yang akan datang.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik

berikut ini merupakan kriteria/persyaratan laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI adalah sebagai berikut:

1. Relevan.

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan mencakup:

a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi eskpektasi mereka dimasa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yag dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi keuangan mungkin dapat dikatakan relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang tersedia dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, jika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisiensian, dan ketidakefektifan (IHPS 1 tahun 2020).

Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Zamrana dalam Riyadi dan agung, 2014: 468). Chinn dalam Zoelisty dan Adityawarman (2014: 16) mengatakan bahwa stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat

manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Teori ini juga mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Hal ini menggambarkan maksimisasi utilitas kelompok principal dan manajemen. Maksimalkan utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996 dalam Zoelisty dan Adityawarman, 2014: 16) dan non profit lainnya (Vargas, 2014 dalam Zoelisty dan Adityawarman, 2014: 16) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

Salah satu hal yang juga mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau *website*. Sistem informasi yang didukung Teknologi Informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Menurut Jogiyanto (2007), informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Tersedianya teknologi informasi

diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan tepat waktu.

Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Soppeng diproses secara system, akan tetapi beberapa perangkat teknologi informasi pengolahan data keuangan sebagai data akun dalam laporan keuangan tidak diolah secara system teknologi informasi, khususnya pada akun piutang dan pendapatan sehingga informasi yang dihasilkan pada penyajian laporan pendapatan pada laporan keuangan pemerintah daerah rentang terhadap andalan informasi, pendapatan merupakan bagian dari akun yang disajikan pada laporan keuangan sepebuhnya belum didukung dengan system teknologi informasi, seperti pendapatan retribusi pasar pada dinas Koperasi, perindustrian dan usaha Kecil Menengah, pendapatan retribusi pelayanan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi IMB pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 2014). Akadun (2009: 114) mendefinisikan teknologi informasi sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi sehingga menjadi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al, 2000 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Teknologi menggunakan seperangkat komputer untuk melakukan pengolahan data, sistem jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi yang digunakan agar data dapat dipublikasikan dan di akses secara global.

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu kegiatan pemerintahan telah berjalan dengan baik, maka dari itu pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wati *et al.*, 2014: 1).

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng yang dihasilkan oleh bidang akuntansi, oleh karenanya diperlukan kompetensi SDM yang memadai dalam menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sebab SDM yang tinggi sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Dengan demikian Sumber daya manusia merupakan bagain penting dalam kesiapan implementasi penyusunan Laporan Keuangan lingkungan pemerintah Kabupaten Soppeng.

Kompetensi merupakan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari segi



kuantitas dan kualitas akan meningkatkan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Namun sudah jadi permasalahan umum yang terjadi di pemerintahan khususnya pemerintah daerah bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik (Furham, 1990 dalam Aruan, 2003 dalam Fikri et al., 2015: 3). Menurut Aruan (2003) dalam Fikri et al. (2015: 8), kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya.

Kompetensi Sumber daya manusia kabupaten Soppeng dalam bidang pengelolaan keuangan khususnya yang berkostribusi langsung pada penyajian Laporan keuangan pemerintah daerah cukup memadai, kompetensi aparatur dilihat dari dua sisi yaitu kompetensi akuntansi yang merupakan latar belakang Pendidikan akuntansi dan kompetensi dari adanya Pendidikan dan pelatihan akuntansi bagi pengelola keuangan, dari sisi Pendidikan formal akuntansi hampir semua perangkat daerah tidak memiliki tenaga akuntansi yang melakukan penyusunan Laporan

Keuangan, disisi lain tingkat pendidikan memiliki peranan yang penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena jenjang pendidikan terakhir seseorang dapat mempengaruhi pemahaman tentang pelaporan keuangan yang berstandar akuntansi, Dengan adanya pendidikan yang memadai, staf bagian keuangan/akuntansi akan lebih mengerti dan memahami pekerjaan yang harus dilakukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal staf bagian akuntansi dan dengan latarbelakang akuntansi maka akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan adanya tingkat pendidikan yang memadai dan berlatarbelakang akuntansi. Dengan demikian untuk tetap menjaga kompetensi aparatur maka kegiatan – kegiatan Pendidikan pelatihan, kursus keuangan dan akuntansi menjadi pilihan bagi pemerintah daerah ditengah keterbatasan kompetensi dari sisi formalitas pendidikan

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008 dalam Nurillah, 2014: 9). Sehingga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia melainkan juga kompetensi yang dimiliki SDM.

Di era saat ini, selain memiliki kompetensi, SDM juga diwajibkan menguasai teknologi informasi demi mencapai tujuan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada tiap entitas baik sektor swasta maupun pemerintahan tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan teknologi informasi

adalah untuk mendukung kepentingan organisasi. Rahadi (2007:11) menyatakan bahwa Teknologi Informasi (TI) mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga. *Decision-Usefulness Theory*, menjelaskan bahwa nilai informasi yang tidak didukung dengan pemanfaatan teknologi, akan menghambat dalam memenuhi karakteristik kualitatif berupa ketepatanwaktu dan juga dalam rangka pengambilan keputusan (Syam, 2015: 90). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga laporan keuangan pemerintah Daerah dapat berkualitas. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami teknologi dan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2009:17) dalam Ramadhan (2015: 3) yaitu untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan. Emilda (2014), membuktikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahman (2012) menjelaskan bahwa kompetensi, pelatihan dan

pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan pertanggung jawaban laporan keuangan satuan Dekonsentrasi satuan kerja Pemerintah Aceh.

Penelitian Ariesta (2013) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Surastiani dan Handayani (2015), menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Anwar dan Mukadarul (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, komitmen pemimpin, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Pradono dan Basukianto (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PPK-SKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Nurillah (2014) menyebutkan bahwa kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern

berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian sebelumnya variabel pemanfaatan teknologi informasi merupakan variabel dependen sedangkan pada penelitian ini menjadi variabel moderasi. Peneliti tertarik untuk menjadikan variabel moderasi adalah untuk melihat apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Dengan Judul **“Peran Moderasi Pemanfaatan Sistem Teknomogi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Apakah Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi bagi PPK SKPD berpengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis.

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi bagi PPK SKPD terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang akan dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu:

1. Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh dari bangku kuliah dengan yang ada di lingkungan pemerintahan daerah.
2. Dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca yang ingin menambah wawasan di bidang ilmu keuangan khususnya pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagi civitas akademika dapat menambah informasi serta sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pengambilan kebijakan, yaitu:

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi daerah, dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan, serta memperkaya kajian dan melengkapi kajian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang keuangan daerah dengan melihat dan menilai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelola keuangan daerah Daerah serta bagaimana motivasi kerja pegawai memoderasi faktor- faktor tersebut.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Teori Stewardship**

Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya (Zamrana dalam Riyadi dan agung, 2014: 468).

Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Zamrana dalam Riyadi dan agung, 2014: 468). Chinn dalam Zoelisty dan Adityawarman (2014: 16) mengatakan bahwa stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Teori ini juga mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Hal ini menggambarkan maksimasiliasi utilitas kelompok principal dan manajemen. Maksimalkan utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok



organisasi tersebut. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996 dalam Zoelisty dan Adityawarman, 2014: 16) dan non profit lainnya (Vargas, 2014 dalam Zoelisty dan Adityawarman, 2014: 16) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

Berbeda dengan *agency theory* yang mengamsumsikan bahwa pemerintah sebagai agen yang bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri sehingga tidak dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Tindakan agen tersebut bertentangan dengan konsep di instansi pemerintahan. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dengan demikian manajemen dilingkungan pemerintah lebih dominan bertindak sebagai *steward* dibandingkan sebagai agen.

Teori ini menjadi landasan penelitian yang menjelaskan bahwa masyarakat sebagai *principal* mempercayakan pemerintah sebagai *steward* untuk mengelola organisasi (pemerintahan) demi kesuksesan organisasi. Sumber daya manusia akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dengan cara memaksimalkan kompetensi dalam hal menyelesaikan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan organisasinya. Selain itu sumber daya manusia akan bertindak yang terbaik dengan cara mengoptimalkan sistem pengendalian intern untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

### 2.1.2. Teori Kegunaan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*)

Teori Kegunaan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*) Teori kegunaan-keputusan (*Decision-Usefulness Theory*) informasi akuntansi dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standar Boards* (FASB), yaitu *Statement Of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *A Theory Of Accounting To Investor* (Staubus, 2003 dalam Fikri et al., 2015: 6). Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. FAF membuat GASB pada tahun 1984 dalam hubungan “kakak-adik” dengan FASB. GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non pemerintahan dan organisasi nonprofit (Freeman, 2008 dalam Untary, 2015: 22).

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan para penyaji informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan. Selanjutnya juga mengatakan bahwa sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer dan kualitas sekunder.

Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (*relevance*) dan reliabilitas (*reliability*). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan. Dikatakan relevan jika informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan.

FASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya.

Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictive value*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*). Teori telah menjelaskan bahwa untuk mencapai kualitas laporan

keuangan yang baik maka diperlukan pemanfaatan teknologi yang memadai. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat mencapai kandungan kualitas primer dari teori kegunaan informasi

### **2.1.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik (Furham, 1990 dalam Aruan, 2003 dalam Fikri et al., 2015: 3). Menurut Aruan (2003) dalam Fikri et al. (2015: 8), kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi urgen baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.

### **2.1.4. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam organisasi sektor swasta tetapi juga dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan, disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 2014). Akadun (2009: 114) mendefinisikan teknologi informasi sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi sehingga menjadi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (software), database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al, 2000 dalam Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010). Teknologi menggunakan seperangkat komputer untuk melakukan pengolahan data, sistem jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi yang digunakan agar data dapat dipublikasikan dan di akses secara global.

Salah satu pendorong dan termasuk reformasi pemerintahan untuk mewujudkan good governance (khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah)

adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan (Akadun, 2009: 130). Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010), bahkan komputer juga dapat mengerjakan pekerjaan yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh manusia. Pengolahan data menjadi sebuah informasi dengan menggunakan bantuan komputer akan lebih meningkatkan nilai dari sebuah informasi yang dihasilkan.

Peningkatan nilai informasi misalnya, informasi yang memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disediakan dalam waktu yang cepat dan tepat. Pemrosesan data dapat dilaksanakan secara manual yang akan menghasilkan suatu informasi dengan waktu yang lebih lama daripada pemrosesan data dengan menggunakan komputer sehingga biaya yang dikeluarkan akan relatif lebih banyak. Sedangkan dengan bantuan komputer, pengolahan data dapat diatur sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan tepat waktu dan dengan biaya yang masih dibawah manfaat yang dihasilkan.

Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan

proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan government untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit (Nuryanto dan Nunuy, 2013: 159).

Menurut Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010:7), pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem.

Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya.

### **2.1.5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pemerintah daerah harus berupaya menyajikan informasi keuangan yang akurat dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya kriteria/persyaratan laporan keuangan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan para pemakai laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan kriteria/persyaratan laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI adalah sebagai berikut:

1. Relevan.

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan mencakup:



e. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi eskpektasi mereka dimasa lalu.

f. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

g. Tepat waktu.

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

h. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi keuangan mungkin dapat dikatakan relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c. Netralitas  
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan  
Informasi yang ada dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya.
  4. Dapat dipahami  
Informasi yang tersedia dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

#### **2.1.6. Keterkaitan Antar Variabel**

- a. Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Kompetensi berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas seseorang demi keberhasilan organisasinya. Keberhasilan organisasi sangat dekat kaitannya dengan laporan keuangan yang berkualitas. Jadi untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidang akuntansi.

- b. Pemanfaatan sistem teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010:7), pemanfaatan sistem teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut laporan keuangan akan lebih akurat dan cepat dihasilkan. Jadi laporan keuangan akan lebih berkualitas jika pemanfaatan teknologi informasi memadai.

## **2.2 Tinjauan Empiris**

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan

sebagai sebuah data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti yang perlu dijadikan sebagai bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti dalam penelitian ini:

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Arfianti (2011) juga melakukan penelitian mengenai factor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Sukmaningrum (2012) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh dan faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai pemoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Nurillah (2014) menyatakan bahwa kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sudiarianti dkk. (2015) melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagai variabel independen serta sistem pengendalian intern (SPIP) dan standar akuntansi pemerintah (SAP) sebagai variabel intervening. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SPIP, SAP, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; penerapan SPIP dan SAP berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; serta kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan SPIP dan SAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani (2015) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pradono dan Basukianto (2015) juga pernah meneliti mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel independen kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi, sistem pengendalian intern, dan PPK-OPD. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia,

teknologi informasi, rekonsiliasi, dan sistem pengendalian intern 51 berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan PPK-OPD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Afiah dan Azwari (2015) meneliti pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berhasil memediasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Mukadarul (2016) menyatakan bahwa kualitas SDM, komitmen pemimpin, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Agustina dan Riharjo (2016) meneliti faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern dan hasil penelitian menyatakan bahwa Lingkungan pengendalian serta informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, penilaian risiko dan pemantauan tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah, sedangkan aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah.

Suliyantini (2016) melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan menyatakan bahwa Kompetensi sumber daya

manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan SAP, namun kompetensi berpengaruh terhadap sistem pengendalian intern.

Penelitian Riandani (2017), menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sulistyowati (2017) meneliti tentang pengaruh kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Semarang dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel intervening. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berperan penting terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

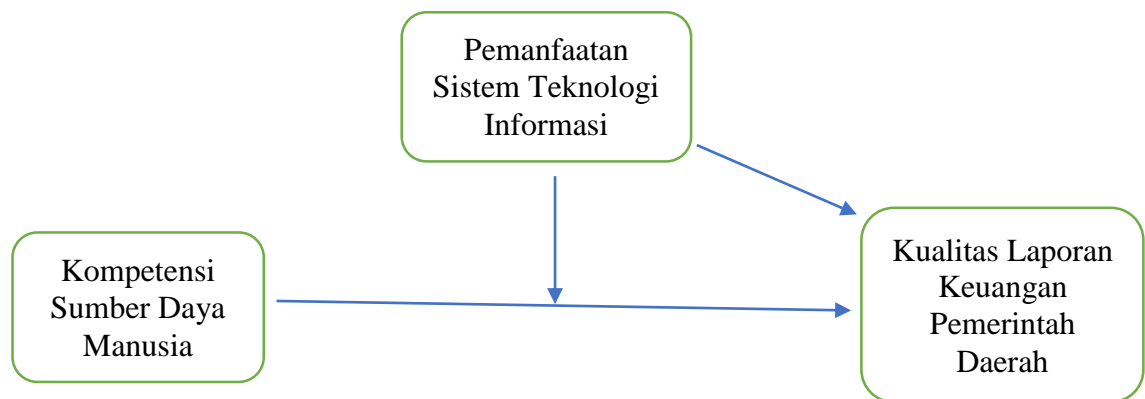
Penelitian Riendany (2009) menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Hardiyansah (2016), dan hasilnya menunjukkan bahwa bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **BAB III**

## **KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

### **3.1. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dari kajian-kajian teori yang telah dikemukakan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh hubungan antara variable, yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual



## **3.2. Pengembangan Hipotesis**

### **3.2.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Wirawan (2009: 1), sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penting agar laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat berkualitas. Untuk itu, setiap OPD harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Djaafar dalam Yanto (2013) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang menguasai ilmu dan teknologi serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan merasa bahwa manusia mempunyai hubungan fungsional dengan sistem sosial. Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai principal mempercayakan pemerintah sebagai steward untuk mengelola organisasi (pemerintahan) demi kesuksesan organisasi. Sumber daya manusia akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dengan cara memaksimalkan kompetensi dalam hal menyelesaikan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan oganisasinya.

Sumber daya manusia yang berkompeten, didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, mempunyai pengalaman di bidang keuangan, berperilaku yang baik, dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan. Hasil penelitian Arfianti (2011) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah tetapi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Surastiani dan Handayani (2015) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiarianti dkk. (2015).

Hasil penelitian yang mendukung pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan yaitu dilakukan oleh Wati dan Pratiwi. Wati *et al.* (2014: 9) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sama halnya penelitian Pratiwi *et al.* (2015: 9) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah.

*H1 = Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah*

### **3.2.2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Teknologi informasi dapat membantu sumber daya manusia dalam mengelola keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan

oleh sumber daya manusia dibidang akuntansi tapi memanfaatkan teknologi bisa meminimalisir kesalahan dari manusia itu sendiri. Menurut Hamzah (2009) dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010:7), pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini.

Hal ini sesuai dengan teori kegunaan informasi *Decision-Usefulness Theory* yang menyatakan bahwa kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan para penyaji informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Hanafi, 2013: 89). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharuskan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah No.56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menerapkan satu data satu sistem.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Hasil penelitian Nurillah (2014) dan Maulidia (2015), menunjukkan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan.

*H2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Soppeng.*

### **3.2.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi**

Kepuasan masyarakat erat kaitannya dengan kesuksesan organisasi. Pemerintah akan menunjukkan keberhasilan dan kesuksesannya melalui publikasi laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat diperoleh dari sumber daya yang berkompeten dibidang akuntansi. Hal ini sesuai dengan teori kegunaan informasi *Decision-Usefulness Theory* yang menyatakan bahwa kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan para penyaji informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan. Selanjutnya juga mengatakan bahwa sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi dalam bentuk pelaporan keuangan

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota

Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Begitu juga dengan penelitian Tantri (2012) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di 37 instansi pemerintahan Kabupaten dan Kota Semarang belum memiliki kompetensi sesuai pekerjaannya, hal ini terbukti tidak ada satu pun laporan keuangan yang diterima Badan Pemeriksa Keuangan dengan predikat baik (Koran Tempo edisi 16 Januari 2009).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2011) yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.

Abadun (2017;130) menyatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan. Kaitannya dengan tata kelola keuangan pemerintah, teknologi informasi harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan suatu informasi keuangan pemerintah yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan banyak keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan

Mukadarul (2016) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian Surastiani dan Handayani (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah.

*H3 = Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi*